PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 28 Februari 2017 Halaman: 14

KEBIJAKAN WALI KOTA

Sulis Lantik Majelis Pertimbangan

UMBULHARJO—Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Keberadaan majelis pertimbangan untuk wali kota itu tugasnya menyelesaikan semua indikasi kerugian negara sebelum masuk ranah hukum.

Anggota MP TPTGR adalah Sekretaris Daerah Kota Jogja Titik Sulastri, Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kadri Renggono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan (BKDP) Maryoto, dan Kepala Bagian Hukum Basuki Hari Saksono.

Mereka dilantik melalui Keputusan Wali Kota Jogja No.136/2017. Pelantikan ini merupakan perpanjang sejak MP TPTGR yang dibentuk pada 2016 lalu. Sulistiyo mengatakan MP TPTGR akan membantunya menyelesaikan temuan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat terkait dengan perbendaharaan di Pemerintah Kota Jogja.

"Yang berpotensi mengakibatkan kerugian daerah atau negara," kata Sulis seusai melantik MP TPTGR di Balai Kota Jogja, Senin (27/2).

Menurut Sulis, kerugian negara bisa disebabkan oleh tiga pelaku. Pertama, bendahara atau kuasa pengguna anggaran di Pemerintah Kota Jogja yang tidak mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran dengan baik.

Kedua, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bukan bendahara, yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, menghilangkan barang inventaris, menipu, dan korupsi. Kemudian pihak ketiga yang tidak memenuhi janji dan melakukan penipuan.

Sulis mengatakan tugas MP TPTGR tidak mudah karena yang diperiksa nantinya adalah teman sendiri sehingga berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Namun, ia percaya MP TPTGR mampu menjalankan tugasnya secara proporsional. Sulis juga meminta fungsi majelis segera disosialisasikan kepada masyarakat supaya ikut mengawasi sebagai bagian dari kontrol sosial.

Inspektur Kota Jogja, Wahyu Widayat siap bekerja secara profesional menjalankan tugas di MP TPTGR. Ia mengaku akan konsen untuk menangani kerugian negara yang sudah ada rekomendasi dari BPK dan BPKP. Misalnya, kata dia, jika terjadi kerugian negara Rp200 juta, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu PNS yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut.

"Kecuali kalau tidak mau membayar pasti akan kami ajukan ke ranah hukum," kata Wahyu.

Ia mengaku wilayah kerja MP TPTGR bekerja di luar jalur hukum setelah ada rekomendasi BPK dan BPKP terkait dengan kerugian negara. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005